

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan (terhadap komunitas Muslim di Pattani) yang terjadi belakangan ini, bukanlah satu hal luar yang biasa, karena hal demikian telah terjadi semenjak dari abad ke-19 Masehi. Konflik yang terjadi pada saat itu adalah konflik antara pemerintah Thailand dengan kaum minoritas yaitu etnis Melayu Muslim Pattani dengan Pemerintah Thailand. Konflik yang hingga kini belum menemukan titik temu ini, Karena etnis Muslim Melayu menuntut kemerdekaan dan berusaha melepaskan diri dari wilayah dan pemerintahan Thailand.

Pertama pemerintah Thailand menggunakan Eksploitasi dibidang ekonomi, melakukan penindasan ekonomi terhadap bangsa atau masyarakat Melayu Patani, yaitu mengeksplointasi semua sumber daya alam di Patani, penindasan ini dilakukan dengan politik monopolistik demi kepentingan golongan mereka dan untuk pembangunan kerajaan Siam Tahi di Bangkok. Ekonimi dan kemiskinan di anggap sebagai salah satu faktor terjadinya konflik antara Masyarakat dan pemerintah Tahiland. Miskipun Wilayah Tahiland selatan merupakan tempat yang kaya akan sendur alamnya, tapi masih banyak masyarakat Melayu Patani dibawah garis-garis kemiskinan.

Pemerintah Thailand melakukan diskriminasi keatas bangsa Melayu Patani dan memhisap kekayaan alam di Patani dengan cara pelahan dan tidak di sadari oleh Bangsa Melayu Patani Bangsa Melayu Patani hari ini harus bangun dari tidur dan melihat apa yang telah di lakukan diskriminasi oleh Pemerintah Thailand terhadap Bnagsa Melayu Patani.

Sejarah Konflik di Patani Selatan Thailand Konflik yang terjadi di Patani Selatan Thailand merupakan Konflik yang telah lama berlaku, konflik ini adalah Konflik di antara etnis Melayu (Komunitas Melayu) dengan etnis Siam (Pemerintah Thailand). Pada awalnya Konflik ini diwarnai dengan pertentangan secara lokal konsekuensi dari proses pelausan wilayah kekuasaan Thailand, namun telah terjadi pembagian bats-batas wilayah serta penghapusan kekuasaan raja-raja melayu Patani melalui perjanjian anglo 1902 yang setuju oleh inggeris, lahrnya rasa tidak-puas-hati dari kalangan raja dan masyrakat melayu Patani yang menjadi akar kepada Konflik bersenjata berkepanjangan di Patani.

Diskriminasi pemerintah Thailand semakin terlihat setelah mulculnya pelaturan-pelaturan lokal,kaum minoritas yang berbasiskepada Islam harus dihapuskan, bagi masyrakat Melayu jugak diwajibkan memaikan aksara setia Bahasa Thai, menggatikan Bahasa Melayu yang selama ini mereka pakai. Puncaknya tidak-puas-hati masyrakat Patani kepada pemerintah pusat (Thailand) berujung kepada mulculnya gerakan-gerakan bersenjata yang anti pemerintah Thailand.

Konflik Patani bukan Konflik Agama bukan juga Konflik segulongan akan tetapi Konflik Patani adalah Konflik yang lahir sebagai umpan balik dari peluasan kekuasaan kerajaan Siam Thailand pada tahun 1785M. Untuk menyusun jalan penyelesaian dalam hal ini agak sedikit sulit apabila dengan sikap Pemerintah pusat yang bersikap tutup mata telinga dengan aspirasi masyarakat selatan kebanyakan masyarakat di 4 provinsi tidak puas hati dengan kebijakan-kebijakan yang di oleh pemerintah Thailand.

Muslim Pattani secara umum lebih banyak dideskripsikan sebagai komunitas Muslim yang sering melakukan gerakan perlawanan bersenjata serta menentang sikap dan perlakuan diskriminatif pemerintah Thailand. Pemberitaan media juga turut menggambarkan bahwa kekerasan kerap berlangsung dan diwarnai dengan aksi balas dendam yang menimbulkan banyak korban, baik dari komunitas Muslim maupun dari masyarakat Thai yang beragama Budha. Kenyataan yang dinamakan oleh kaum komunitas Muslim di Selatan Thailand sebagai kaum tertindas, terutama disebabkan oleh sikap Pemerintah yang *“mau menang sendiri”* dan tidak bersedia memahami aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Islam Pattani.

Konflik berawal dari aksi protes yang dilakukan etnis Muslim Melayu terhadap pemerintah Thailand itu dikarenakan. Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand tidak memihak dan atau bersifat diskriminatif terhadap kaum minoritas di Selatan. Aksi protes tersebut dilakukan dengan melakukan aksi demonstrasi di sejumlah wilayah di Pattani. Mobilisasi

massa dan perlawanan yang dilakukan etnis Muslim Melayu terjadi karena adanya kecemasan akan keberlangsungan dan penghapusan identitas mereka. Perlawanan yang terjadi mulai dari yang kecil hingga aksi yang besar dan terorganisir, yang bertujuan untuk mencari simpati dan dukungan internasional. Mereka berharap dengan adanya dukungan dari dunia internasional, aspirasi mereka dapat lebih didengar dan mendapatkan jaminan perlindungan. Namun seiring waktu berjalan, aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat etnis Muslim Melayu tidak lagi terbatas bertujuan untuk mencari simpati dan dukungan internasional, namun berkembang menjadi keinginan a

Perlawanan untuk menuntut kemerdekaan etnis Muslim Melayu di Thailand, dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti BRNMP (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani), PULO (Pattani *United Liberation Organization*), dan GMIP (Gerakkan Mujahideen Islam Pattani). Ketiga organisasi ini merupakan kelompok etnonasionalis yang menuntut akan kemerdekaan yang di payungi dan dikoordinasi satu organisasi dalam tiap gerakan dan perlawanan yang dilakukannya, Organisasi tersebut adalah BRN. Organisasi ini melakukan aksinya dengan melakukan perlawanan terhadap pos polisi, militer dan infrastruktur Pemerintahan lainnya.

Ketegangan terjadi hampir di seluruh wilayah Selatan Thailand, adanya organisasi-organisasi tersebut berpengaruh besar pada gerakan kemerdekaan yang terjadi di Thailand Selatan. Serangan-serangan yang di lancarkan kepada pemerintah Thailand semakin gencar dilakukan, serangan yang terjadi juga semakin

terarah dan terkoordinasi. Di tahun 2004 saja telah terjadi ratusan aksi protes dan kasus penembakan yang dilakukan oleh masyarakat etnis Muslim Melayu ini.

Sebagai tindak balas terhadap serangan pihak gerakan itu, Thailand melancarkan serangan balik terhadap gerakan kemerdekaan. Dalam serangan yang dilancarkan oleh aparat pemerintahan Thailand banyak terjadi kontak senjata dan berakibat bukan hanya terhadap para gerakan, namun berdampak kepada masyarakat sipil. Dalam serangan-serangan oleh pemerintah Thailand, banyak serangan yang salah sasaran.

Namun demikian hal itu bukannya berdampak pada redanya konflik, akan tetapi menambah angka korban jiwa dari kedua pihak dan juga masyarakat sipil. Terhitung dari 2004 hingga 2016 lalu telah memakan korban jiwa sebanyak 22,397 jiwa dan statistik angkataan korban dan kasus yang terjadi semakin bertambah dari hari ke hari.

Aksi gerakan Kemerdekaan yang dilakukan dengan cara agresif oleh etnis Muslim Melayu ini telah menimbulkan Keresahan Pemerintah Thailand. Sehingga Pemerintah Thailand merasa perlu melakukan tindakan untuk merespon gerakan Kemerdekaan dengan melancarkan kebijakan paksa dan perintah berkurung (*emegesi law*) pada empat provinsi selatan Thailand.

Dalam waktu yang sama berdasarkan data statistik *deepsouth watch* media pengamat konflik Patani. pada tahun 2018 konflik lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

Peristiwa keganasan terjadi pada Januari 2018 sebanyak 27 kali, jumlah korban nyawa tercatat 16 jiwa dan 46 orang terluka. Sedangkan pada Januari tahun 2017 peristiwa terjadi sebanyak 23 kali, jumlah korban 14 jiwa dan 14 orang terluka.

Jika dilihat dari pembangunan ekonomi di Patani, tampak semakin meningkat dan diakui sebagai teritorial ekonomi yang sedang berkembang, namun situasi konflik yang masih berlangsung tidak menjamin keselamatan bagi rakyat sipil.

Konflik di Patani mulai memanas kembali dan terhitung semenjak tahun baru sebanyak 50 orang warga sipil ditangkap sebagai tersangka dalam penyerangan ganas. Hal ini pemerintah belum mempunyai bukti yang jelas hanya memberlakukan undang-undang darurat militer dalam operasi penangkapan yang akhirnya membuat warga keraguan terhadap tekanan-tekanan pemerintah.

Situasi Patani hari ini semakin bertambah, kesenjangan di antara rakyat Patani dari keinginan wujudnya kedamaian yang dicita-citakan semakin menjauh.

Munculnya masalah 3 tahun pasca tindakan kekerasan di Tak Bai, Thailand Selatan, yang dikenal sebagai tragedi pembantaian yang brutal, sebagai dampak dari kasus penangkapan enam warga sipil atas tuduhan pemberontak, menjadi puncak api demonstrasi ribuan warga Patani di depan Kantor Polisi Takbai, 25/10/2004. Tragisnya, kejadian tersebut menewaskan warga Patani sebanyak 86 dan ratusan orang yang hilang tidak tahu nasibnya, dampak dari pembubaran demonstrasi oleh aparat Thailand.

Tragedi tersebut mengobarkan konflik antara warga Patani dengan Pemerintah Thailand semakin membara dan tak usai berhenti. Menurut Human Righth wacth melaporkan bahwa konflik Patani tersebut sudah mengorbankan nyawa warga sipil 6,800 orang sejak tahun 2004-2016.

“Ketika identitas dan Bahasa Melayu tak diakui, orang-orang Patani selalu kalah berkompetisi dengan masyarakat Thailand,” jelas Suaedi dalam diskusi Peringatan 13 Tahun Tragedi Tak Bai: Memahami Konflik Di Balik Tragedi Kemanusiaan di Patani (Thailand Selatan). Patani terjadi karena konsep nasionalisme yang belum selesai. Pemerintah Thailand belum bisa menerima keberagaman di Thailand Selatan yang berbasis Muslim.

Berbagai kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Thailand dalam membangun system kehidupan Masyarakat Muslim Patani sekaligus meredam Konflik yang terjadi di tiga Wilayah Selatan. Adapun kebijakan-kebijakan adalah:

1. Bidang Ekonomi, Pemerintah telah membangun zona ekonomi tiga segi untuk membangun serta meningkatkan kehidupan yang layak bagi Masyarakat Muslim.
2. Bidang kemiliteran, pada awal tahun 2016 pemerintah telah memperkemas dan memperketak pertahan militer dengan harapan dapat menyekat perkerakan pihak-pihak separatis.
3. Bidang pendidikan, pemerintah telah mensosialisasikan pendidikan berencana untuk menampung serta membangun kehidupan dalam dunia pendidikan bagi masyarakat Muslim patani.

Kehidupan masyarakat semakin rendah kewibawaan karena pemerintah Thailand mengasimilasi, mengeksploitasi ekonomi di Wilayah Patani, dengan kebijakan menjadi tekanan bagi masyarakat. Masyarakat Muslim Patani tidak bisa diterima aturan-aturan atau kebijakan Pemerintah Thailand untuk menangani ekonomi di Wilayah Patani, karena ini sebagai kebutuhan paling pokok dalam Masyarakat. Hasil atau pendapatan dari ekonomi ini tidak lain adalah (petani) ini sebagai hasil paling penting bagi Masyarakat Patani. Pendapatan hasil (petani) melalui tanam-tanaman, karet, buah-buahan dan hasil dari pelabuhan ikan. Sampai sekarang Masyarakat Patani tidak memuaskan dalam aturan-aturan Pemerintah itu.

Konflik etnis antara warga Thailand yang beragama Buddha dan Muslim Melayu telah berlangsung sejak lebih dari satu abad yang lalu. Pemberontakan yang mulai meletus lagi pada Januari 2004, telah menewaskan hampir 7.000 warga sipil, pegawai negeri, pasukan keamanan dan militan. Tidak ada yang secara terbuka mengaku bertanggung jawab atas serangan bom dan serangan bersenjata serta pembunuhan para biksu Buddha dan ulama Muslim.

Juru bicara BRN mengatakan bahwa kelompok itu siap untuk melakukan pembicaraan damai, namun tawaran damai mereka kepada pemerintah Thailand April lalu tak dihiraukan, yang menegaskan bahwa satu-satunya cara mereka untuk berbicara dengan BRN adalah kalau BRN bergadung dengan koalisi Mara Patani “Aktor utama adalah BRN dan pemerintah di Bangkok. Kedua pihak ini perlu berunding. Jadi proses dialog sesungguhnya ada di antarkedua pihak ini. Sesuatu

yang meyim pang dari kenyataan ini adalah apa yang saya sebutkan lagi sebuah-sebuah proses kosmetik. Hal itu hanya akan menjauhkan kita dari dialong sesungguhnya”

Pemerintah Thailand telah menghabiskan hampir 300 miliar baht (Rp 121 triliun) sejak tahun 2004 untuk anggaran keamanan, pembangunan pedesaan, dan pengurangan kemiskinan dalam menanggulangi pemberontakan.

bertitik tolak dari permasalahan yang penulis paparkan itu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian mengenai **Implementasi Kebijakan Pemerintah Thailand Dalam Menangani Konflik di Patani Selatan Thailand.**

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari informasi akurat tentang kejadian dan fakta yang sebenarnya didukung oleh buku-buku sejarah, media sejarah dan politik serta Islam di MuangThai. Artikel-artikel TUNNAS aspirasi Masyarakat Melayu Pattani lembaga-lembaga Pemerintah Thailand (*Islamic Council Of Natathiwat dan Southern Border Provinces Administrion Center*), maka fokus lanjutnya penelitian ini berkenaan dengan implementasi kebijakan pemerintah Thailand dalam menagani konflik berdarah di Pattani.

## **C. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Pemerintah Thailand dalam menangani kasus Konflik di Pattani?

2. Bagaimana hasil dari penerapan kebijakan oleh Pemerintah Thailand dalam menangani masalah Konflik di Pattani?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap penerapan kebijakan itu?

#### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diungkapkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang merupakan titik fokus yang akan memberi jawaban dan terhadap persoalan yang terjadi di seputar permasalahan yang dirumuskan di atas. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini ingin menjawab, menungkap fakta di dalam Politik Pemerintah Thailand terhadap Kaum Minoritas Melayu Pattani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Implementasi kebijakan pemerintah Thailand dalam menangani konflik Pattani.
2. Mengukur hasil terhadap bentuk implementasi kebijakan politik pemerintah Thailand.
3. Pengaruh dari penerapan implementasi kebijakan politik Thailand terhadap kaum minoritas Melayu Pattani.

### **E. Manfaat penelitian**

1. Secara Teoritis Sebagai memberikan kontribusi akademik, bagi meningkatkan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang gerakan sosial politik.

2. Secara Praktis

a. Pemerintah Thailand

Sebagai kontribusi praktis, bagi memberi pemahaman sikap indentitas kelompok minoritas dalam menentukan kebijakan oleh penguasa.

b. Instansi

Memberikan kontribusi keimuan yang baru mengenai Kebijakan yang ada di Negara lain sehingga bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan system kebijakan antara Negara.

c. Penulis

Untuk memenuhi salah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Ilmu Sosial dan politik, khususnya pada bidang kajian analisa politik.

### **F. Kerangka pemikiran**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah Cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplmentasikan kebijakan public, ada dua pilihan langkah. Yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian

implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari progem, ke proyek dan ke kegiatan mobil tersebut megadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen khususnya manajemen sector public kebijakan diturunkan berupa program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintahan dengan masyarakat.

kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan memasyarakatkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya, meski pun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah waktu dan karakteristik yang dimiliki oleh implementasi seperti komitmen, kejujuran sifat, demokrasi. Apabila implementasi memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan mendorong melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.



Menurut Jones (1996) dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

- a. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak;
- b. Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
- c. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (interpretation), dan penerapan (applications), dimaknai sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian (organization) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan).

- Menurut Wilson (1903:572) pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian, tidak selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, tapi dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan mereka, dengan hal-hal yang memberikan perhatian urusan publik publik.

- Thomas Hobbes (1588-1679) Thomas Hobbes adalah orang yang paling berpengaruh dalam mengembangkan paham materialisme. Menurutnya, semua makhluk hidup terbentuk dari substansi materi saja. Adapun kesadaran dan roh manusia, timbul karena adanya pergerakan partikel-partikel dalam otak. Paham materialisme menganggap sifat dasar manusia adalah semata-mata untuk memenuhi kepentingan egonya. Oleh karena itu, Hobbes gatakan manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya homo homini lupus atau al against al Karenanya, kehidupan masyarakat diwarnai dengan pola relasi dominasi dan penindasan.

